

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten Purworejo Tahun 2017 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017. Program dan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2017 diarahkan kepada penyelesaian pencapaian tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah disusun dalam suatu tahapan tertentu untuk menjamin adanya konsistensi dan keberlanjutan proses pembangunan serta keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

Dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, serta masalah dan tantangan yang akan dihadapi pada pelaksanaan tahun berjalan dengan RKPD, ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahunan yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan.

Prioritas pembangunan tahunan disusun berdasarkan kriteria :

- a. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan;
- b. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
- c. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan, merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya;
- d. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan RKT merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan

Pemerintah Daerah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RKT mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

- a. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah satu tahun;
- c. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah Daerah.

## **2 Dasar hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

### **3. Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah**

Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pembangunan. Bersama-sama dengan perencanaan menjadi komponen dalam siklus pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi adalah merupakan review atas segala hal yang mengarah pada sebuah keberhasilan maupun kegagalan atas upaya yang telah dikerjakan. Menjadi sangat esensial keberadaannya seandainya dapat menjadi titik tolak pelaksanaan pembangunan periode berikutnya.

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Purworejo menghasilkan berbagai pencapaian. Pokok-pokok hasil capaian pelaksanaan pembangunan Kabupaten Purworejo disajikan dalam 2 kelompok besar yaitu Kondisi Umum Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan.

#### **1. Kondisi Umum Daerah**

##### **1.1 Aspek Geografi dan Demografi**

##### **1. Letak, luas dan batas wilayah**

Secara geografis, Kabupaten Purworejo merupakan bagian dari Propinsi Jawa Tengah, yang terletak pada posisi antara 109° 47' 28" - 110° 8' 20" Bujur Timur dan 7° 32' - 7° 54" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Purworejo adalah 1.034,82 km<sup>2</sup> yang terdiri dari  $\pm$  2/5 daerah dataran dan 3/5 daerah pegunungan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Wonosobo dan Magelang  
Sebelah timur : Kabupaten Kulon Progo, Propinsi  
DIY  
Sebelah : Samudra Indonesia  
selatan  
Sebelah barat : Kabupaten Kebumen

## 2. Kondisi Topografi

Kondisi kemiringan lereng atau lereng Kabupaten Purworejo dapat dibedakan menjadi empat (4) kategori yaitu:

- a. Kemiringan 0 – 2% meliputi bagian selatan dan tengah wilayah Kabupaten Purworejo,
- b. Kemiringan 2 – 15% meliputi sebagian Kecamatan Kemiri, Bruno, Bener, Loano, dan Bagelen,
- c. Kemiringan 15 – 40% meliputi bagian utara dan timur wilayah Kabupaten Purworejo,
- d. Kemiringan > 40% meliputi sebagian Kecamatan Bagelen, Kaligesing, Loano, Gebang, Bruno, Kemiri, dan Pituruh.

Posisi ketinggian Kabupaten Purworejo berkisar antara 0 meter sampai dengan 1.064 meter di atas permukaan laut.

Kondisi topografi Kabupaten Purworejo secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Bagian selatan dan barat merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 25 meter di atas permukaan air laut.
- b. Bagian utara dan timur merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 25 – 1064 meter di atas permukaan air laut.

## 3. Kondisi Klimatologis

Kondisi iklim suatu daerah sangat berpengaruh pada potensi daerah bersangkutan, baik dalam potensi sumber daya alam maupun dalam potensi bencana alam. Kabupaten Purworejo beriklim tropis dengan dua musim dalam setahunnya yaitu

musim kemarau dan musim penghujan. Rata-rata suhu udara di Purworejo antara 19–28°C dengan curah hujan rata-rata per tahun berkisar antara 620 mm/tahun hingga 3.720 mm/tahun.

Berdasarkan perbandingan bulan basah dan bulan kering setiap tahun maka curah hujan di Kabupaten Purworejo termasuk dalam kategori tinggi. Curah hujan yang tinggi tersebut secara langsung dapat mengakibatkan penjuanan pada tanah permukaan sehingga mempengaruhi drainase permukaan tanah. Hujan dengan intensitas tinggi merupakan salah satu pemicu (*trigger factor*) terjadinya bencana yaitu banjir dan longsor lahan di Kabupaten Purworejo.

#### 4. Kondisi Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Purworejo dapat dirinci menjadi bahasan mengenai lithologi/batuan, stratigrafi dan struktur geologi. Ketiga aspek geologi tersebut penting kaitannya dengan beberapa fenomena alam khususnya kebencanaan seperti longsor, banjir maupun kekeringan. Proporsi litologi batuan Kabupaten Purworejo berupa batuan sedimen dan perselingan batuan gunung api sebesar 60,1% terdapat di bagian utara dan timur wilayah Kabupaten Purworejo pada daerah dengan topografi tinggi dan 39,9% aluvium tersebar pada daerah dengan topografi rendah di bagian selatan dan barat Kabupaten Purworejo. Susunan batuan/stratigrafi yang menyusun wilayah Kabupaten Purworejo mengikuti tata stratigrafi pada Pegunungan Serayu Utara yang berada di bagian utara dan Pegunungan Menoreh yang berada di bagian timur. Kabupaten Purworejo sendiri memiliki empat bentuk lahan asal proses, meliputi bentuk lahan asal proses struktural, bentuk lahan asal proses fluvial, bentuk lahan asal proses marin dan bentuk lahan asal proses denudasional.

## 5. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi yang dapat dilihat dari potensi air tanah dan keberadaan air permukaan satu daerah adalah tidak sama dengan daerah lainnya walaupun keduanya mempunyai curah hujan yang sama. Hal ini disebabkan kondisi lahan (geologi, geomorfologi, dan tanah) setiap daerah berbeda. Perbedaan-perbedaan ini akhirnya membawa keberagaman dalam potensi sumber daya alam dan potensi kebencanaan alam sehingga pengembangan sumber daya alam daerah harus memperhatikan potensi-potensi alam tersebut. Pengembangan sumber daya alam harus memperhatikan kesinambungan pemanfaatan dan kelestarian lingkungan. Kekeliruan pengembangan sumber daya alam selain berdampak pada degradasi sumber daya alam bersangkutan juga berperan dalam memicu terjadinya bencana alam yang berakibat sangat merugikan.

Kabupaten Purworejo memiliki potensi air yang berasal dari air permukaan dan air bawah tanah. Di Kabupaten ini terdapat beberapa sungai yang mengalir di daerah ini dan bermuara di Samudera Indonesia. Sungai-sungai ini termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto, Cokroyasan dan Wawar. Hulu-hulu sungai tersebut umumnya berada di bagian timur dan utara Kabupaten Purworejo.

## 6. Kondisi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan Kabupaten Purworejo dibagi menjadi dua kategori yaitu lahan kering seluas 72,854.80 Ha atau 70,40 % dan tanah sawah seluas 30,626.97 Ha atau 29,60%. Lahan kering terdiri dari 10,116.50 Ha berupa tanah bangunan dan halaman sekitarnya, 51,598.14 Ha berupa tegal/kebun /ladang/huma, 6,857.88 Ha berupa hutan negara, dan sisanya berupa padang rumput, tambak, tanah lainnya. Luas sawah beririgasi adalah 27,677.14 Ha, sedangkan sawah tadah hujan seluas 2949.83 Ha.

Dinamika penggunaan lahan di Kabupaten Purworejo kurang terkendali. Sebagian besar perubahan yang terjadi berupa alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian seperti untuk perumahan dan permukiman.

#### 7. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah diarahkan pada kawasan budidaya yang direncanakan sesuai kemampuan lahan guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Pemanfaatan kawasan budidaya juga diarahkan dalam rangka mendukung terciptanya struktur ruang yang mendukung bagi pengembangan berbagai sektor pembangunan dan integrasi wilayah. Pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Purworejo dilakukan secara efektif dan efisien serta sinergis, agar pemanfaatan ruang dan sumber daya dapat dilakukan secara optimal. Berkenaan dengan itu, strategi pengembangan kawasan budidaya ditekankan pada upaya-upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

#### 8. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Di Wilayah Kabupaten Purworejo terdapat 4 (empat) kawasan rawan bencana alam, yaitu kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana gelombang pasang dan kawasan rawan bencana kekeringan.

## 9. Demografi

### a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo menurut hasil Sensus Penduduk pada tahun 2010 adalah 694.404 jiwa. Sedangkan kondisi pada akhir tahun 2014 adalah 708.038 jiwa. Dilihat dari persebarannya, Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kutoarjo memiliki jumlah penduduk yang paling banyak yaitu 12 % dan 8 % dari jumlah penduduk Kabupaten Purworejo.

### b. Usia

Sebagian besar Penduduk Purworejo berusia antara 15–64 Tahun. Rasio beban ketergantungan di Purworejo tahun 2014 adalah 35,03. Artinya 100 penduduk usia produktif (15-64) rata-rata menanggung beban 35 penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 keatas).

Kepadatan penduduk Kabupaten Purworejo rata-rata 684,22 orang/km<sup>2</sup>. Dari sisi kewilayahan, terdapat tiga kecamatan yang kepadatan penduduknya di atas 1.000 orang/km<sup>2</sup> yaitu Kecamatan Purworejo dengan kepadatan penduduk sebesar 1.589,05 orang/km<sup>2</sup>, Kecamatan Kutoarjo dengan kepadatan penduduk sebesar 1.563,56 orang/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Bayan dengan kepadatan penduduk sebesar 1.067,24 orang/km<sup>2</sup>. Hal ini disebabkan karena tiga kecamatan tersebut memang merupakan kawasan Aglomerasi yaitu kawasan strategis tumbuh cepat Kota Purworejo-Kota Kutoarjo. Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Kaligesing dengan kepadatan penduduk sebesar 393,56 orang/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Bruno dengan kepadatan penduduk sebesar 403,27 orang/km<sup>2</sup>. Dua kecamatan tersebut memang merupakan daerah dengan kondisi geografis berupa pegunungan yang sebagian wilayahnya memiliki hutan yang cukup luas.

Laju pertumbuhan penduduk Purworejo dari tahun 2013 - 2014 adalah 0,39%. Rata-rata pertumbuhan penduduk Purworejo pertahun sebesar 0,531%. Pertumbuhan penduduk Kecamatan yang di atas rata-rata Kabupaten



Purworejo adalah Kecamatan Ngombol, Purwodadi, Bagelen, Purworejo, Banyuurip, Bayan, Butuh, dan Bruno.

Salah satu ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai adalah dengan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Usia Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup. Sedangkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf merupakan dimensi pokok yang menunjukkan status tingkat pendidikan. Pengeluaran riil per kapita guna mengukur akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Perkembangan IPM Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu tahun 2010-2014 menunjukkan peningkatan. Capaian IPM Kabupaten Purworejo pada tahun 2014 sebesar 70,12 meningkat dari tahun 2013 sebesar 69,77. Jika dibandingkan target yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo 2011-2015.

Komponen pembentuk indikator IPM ada 4 yaitu: Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Lama Sekolah serta Pengeluaran per Kapita. Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Standar UNDP besarnya adalah  $25 < x > 85$  (minimal 25 tahun dan maksimal 85 tahun). Pada tahun 2011 angka harapan hidup di Kabupaten Purworejo adalah 73,56 tahun meningkat menjadi 73,66 tahun di tahun 2013. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 73,83. Kondisi ini masih di bawah Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 73,88 di tahun.

**Angka melek huruf** pada metodologi yang baru berubah menjadi angka harapan lama sekolah yang menunjukkan lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Standart UNDP minimal 0 dan maksimal 18 tahun.

**Rata-rata lama sekolah** adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Pada tahun 2010 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Purworejo adalah 7,39 tahun meningkat menjadi 7,45 tahun di tahun 2011 dan meningkat lagi menjadi 7,51 tahun di tahun 2012. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 7, 63. Kondisi ini lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah yang hanya mencapai 6, 93 tahun di tahun 2014.

**Pengeluaran per Kapita Disesuaikan** merupakan pengeluaran riil perkapita yang telah disesuaikan untuk menggambarkan daya beli masyarakat. Standar UNDP maksimal Rp. 737.720,- yang merupakan proyeksi dari daya beli tertinggi yang dicapai Jakarta pada tahun 2018 dengan asumsi tingkat pertumbuhan daya beli sebesar 6,5% per tahun selama periode 1993-2018. Pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Purworejo meningkat dari Rp. 8.919.000,- di tahun 2010 menjadi Rp. 8.921.00,- di tahun 2011 dan meningkat lagi menjadi Rp. 9.022.000,- di tahun 2012. Pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 9.189.000,-. Namun demikian, pengeluaran per kapita Kabupaten Purworejo masih relatif sedikit lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah yang mencapai Rp. 9.640.000,- di tahun 2014.

IPM Kabupaten Purworejo meningkat setiap tahunnya dan di atas angka provinsi maupun nasional. Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Purworejo yang perlu perhatian adalah Usia Harapan Hidup dan yang perlu kerja keras adalah Pengeluaran per Kapita Disesuaikan.

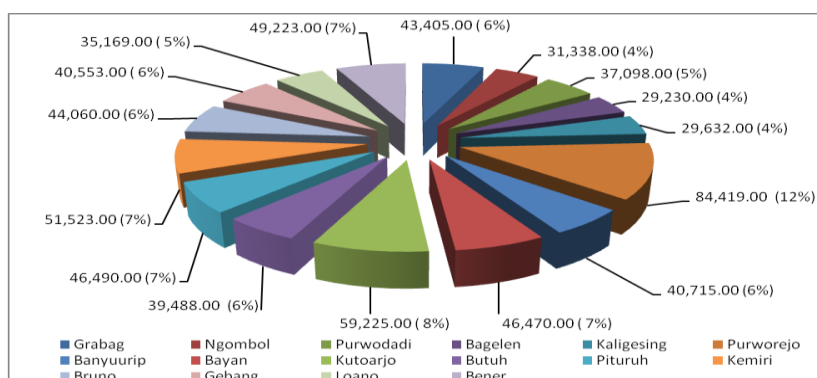
## 1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 1. PDRB dan Perkembangannya

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo menurut hasil Sensus Penduduk pada bulan Mei 2010 adalah 694.404 jiwa. Sedangkan kondisi pada akhir tahun 2014 adalah 708.038 jiwa. Dilihat dari persebarannya, Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kutoarjo memiliki jumlah penduduk yang paling banyak yaitu 12 % dan 8% dari jumlah penduduk Kabupaten Purworejo. Adapun Prosentase Persebaran Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2014 sebagaimana tersaji pada gambar berikut.

Gambar 2.1

Prosentase Persebaran Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2014

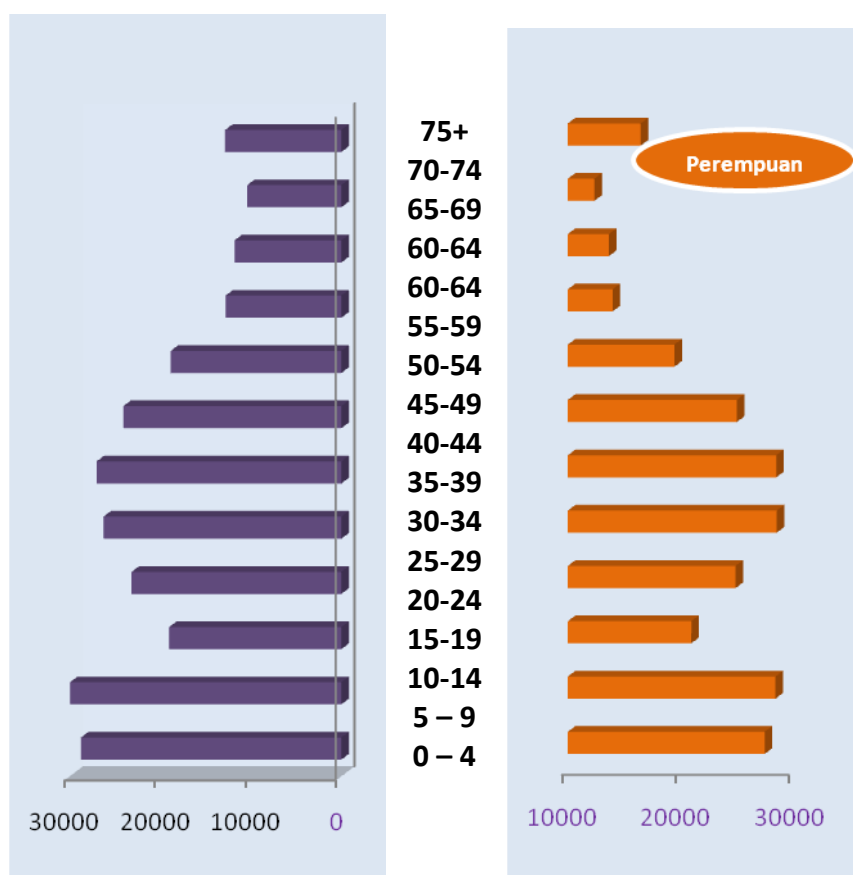


(sumber : Kabupaten Purworejo Dalam Angka, BPS, 2015)

### b. Usia

64,97% Penduduk Purworejo berusia antara 15–64 Tahun. Rasio beban ketergantungan di Purworejo tahun 2014 adalah 35,03. Artinya 100 penduduk usia produktif (15-64) rata-rata menanggung beban 35 penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 keatas). Piramida Penduduk Kabupaten Purworejo tahun 2014 sebagaimana tersaji pada gambar 2.2.

Gambar 2.2.  
Piramida Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2014



(sumber : Kabupaten Purworejo Dalam Angka, BPS, 2015)

Tabel 2.1.  
Perkembangan Besarnya Rasio Beban Ketergantungan

Kelompok Umur	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
0 sampai dengan 14	177.021	177.269	173.164	172.112	170.195
15 sampai dengan 64	444.654	445.226	457.856	457.369	460.005
65 keatas	73.802	73.905	77.563	76.002	77.838
Rasio Beban Ketergantungan (%)	56,42	56,41	54,74	54,25	53,92

Sumber : Kabupaten Purworejo Dalam Angka berbagai tahun terbitan (diolah)

Untuk kabupaten Purworejo tergolong piramida penduduk muda yang berarti angka kelahiran masih lebih besar daripada angka kematian.

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Rasio ketergantungan di bagi menurut usia, tua dan muda:

- 1) Rasio Ketergantungan Muda adalah perbandingan jumlah penduduk umur 0-14 tahun dengan jumlah penduduk umur 15 – 64 tahun.
- 2) Rasio Ketergantungan Tua adalah perbandingan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk di usia 15-64 tahun.

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu Negara atau wilayah, apakah tergolong Negara atau wilayah maju atau Negara atau wilayah yang sedang berkembang. Semakin tingginya persentase menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Berkaitan dengan angka beban ketergantungan Kabupaten Purworejo pada kisaran angka 50-55, menunjukkan kondisi yang hampir seimbang yang berarti jumlah penduduk produktif masih menanggung penduduk non produktif sebesar  $\pm 5\%$ .

Kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk dalam satuan wilayah tertentu. Angka kepadatan penduduk kasar adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk dalam satuan wilayah tertentu. Satuan yang biasa digunakan untuk menggambarkan angka kepadatan adalah orang/hektar atau orang/km<sup>2</sup>. Besarnya angka kepadatan penduduk kasar kabupaten Purworejo pada tahun 2014 sebesar 684,22 orang / km<sup>2</sup> luas wilayah.

Sebagian besar penduduk Purworejo terkonsentrasi di kecamatan Purworejo, Kutoarjo dan Bayan masing masing sebesar 1.601,25; 1.575,37 dan 1.075,41 orang/km<sup>2</sup> (*sumber : Kabupaten Purworejo dalam angka, BPS, 2015*). Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Kaligesing dengan kepadatan penduduk sebesar 396,53 orang/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Bruno dengan kepadatan penduduk sebesar 406,34 orang/km<sup>2</sup>. Dua kecamatan tersebut memang merupakan daerah dengan

kondisi geografis berupa pegunungan yang sebagian wilayahnya memiliki hutan yang cukup luas.

Laju pertumbuhan penduduk Purworejo dari tahun 2013-2014 sebesar 0.3954%. Pertumbuhan penduduk Kecamatan yang di atas rata-rata Kabupaten Purworejo adalah Kecamatan Grabag, Purwodadi, Bagelen, Purworejo, Banyuurip, Bayan, Gebang. *(sumber : Purworejo Dalam Angka, BPS, 2015).*

## **2. Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan**

### 2.1 Evaluasi pencapaian prioritas pelaksanaan pembangunan.

Evaluasi pembangunan adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberikan nilai secara obyektif atas pencapaian hasil-hasil pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Evaluasi pembangunan dilaksanakan secara sistematis dengan mengumpulkan, menganalisis data informasi untuk menilai kelayakan serta pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan.

### 2.2 Evaluasi Atas Pelaksanaan Pembangunan Dalam Dimensi Kewilayahan.

Perkembangan pembangunan suatu daerah pada dasarnya adalah merupakan akumulasi dari perkembangan pembangunan wilayah-wilayah yang menjadi cakupannya. Perkembangan pembangunan Kabupaten Purworejo merupakan akumulasi dari perkembangan pembangunan 16 Kecamatan dan 494 desa yang ada di Purworejo. Dengan demikian perkembangan pembangunan sebuah Kabupaten salah satu faktor penentunya adalah sejauhmana perkembangan wilayah-wilayah cakupannya, seberapa besar kesenjangan antar wilayah yang ada.

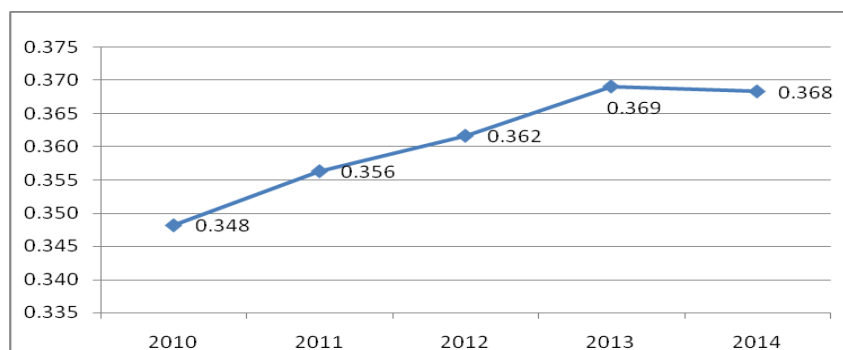
Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber, berupa akumulasi modal, ketrampilan tenaga kerja dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik

suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya konsentrasi aktivitas ekonomi secara parsial dan seringkali memunculkan kondisi ketimpangan antar daerah.

### 2.2.1 Ketimpangan Antar Wilayah

Ketimpangan antar wilayah dapat ditunjukkan dengan besaran Indeks Williamson. Angka indeks ini menunjukkan ketimpangan antar wilayah secara umum dengan pendekatan ekonomi. Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber berupa akumulasi modal, ketrampilan tenaga kerja dan sumber daya alam yang dimiliki suatu wilayah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik, suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antarwilayah. Upaya-upaya pembangunan melalui intervensi program dan kegiatan terhadap suatu wilayah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekaligus memperkecil kesenjangan antar wilayah. Perkembangan tingkat ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Purworejo selama kurun waktu terakhir ini tampak dalam gambar 2.6 berikut ini.:

Gambar 2.6  
Perkembangan Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson) di  
Kab.Purworejo Tahun 2010 s.d 2014



(Sumber data: BPS, PDRB Kecamatan tahun terbit 2011 s.d 2015 (diolah))

Pada gambar tersebut tampak bahwa ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Purworejo memiliki kecenderungan meningkat terus sampai dengan tahun 2013, namun kemudian turun sedikit pada tahun 2014 menjadi 0,368.

Apabila dibandingkan dengan Propinsi Jawa Tengah kondisi ini relative lebih baik. Indeks Williamson Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 sebesar 0,69. Semakin kecil angka Indeks Williamson (mendekati nol) menunjukkan tingkat ketimpangan yang makin kecil atau dengan kata lain tingkat pembangunan antar wilayah makin merata.

Gambar 2.7  
Tipologi Wilayah Kabupaten Purworejo

Pendapatan per kapita (Y) Pertumbuhan Ekonomi (r)	Y<	Y>
r<	Maju Dengan Pertumbuhan Cepat (Purworejo, Banyuurip, Kutoarjo)	Berkembang Cepat (Grabag, Bayan)
r>	Maju Tapi Tertekan (Purwodadi)	Kurang Berkembang (Ngombol, Bagelen, Kaligesing, Butuh, Pituruh, Kemiri, Bruno, Gebang, Loano, Bener)

Sumber data: BPS, PDRB Kecamatan tahun terbit 2015 (diolah)

Gambar 2.7. tersebut diatas menunjukkan tipologi wilayah-wilayah di Kab.Purworejo yang dikelompokkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitanya, dengan titik tolak pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita rata-rata di tingkat Kabupaten.

Terdapat 4 kelompok yaitu:

- 1) Maju dengan pertumbuhan cepat, dimana pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonominya tinggi (diatas rata-rata kabupaten). Termasuk dalam kelompok ini adalah Kecamatan Purworejo, Banyuurip dan Kutoarjo)
- 2) Berkembang cepat, dimana pendapatan perkapita rendah (dibawah rata-rata Kabupaten) namun pertumbuhan ekonominya tinggi (diatas rata-rata Kabupaten

Termasuk dalam kelompok ini adalah Kecamatan Gebang dan Bayan

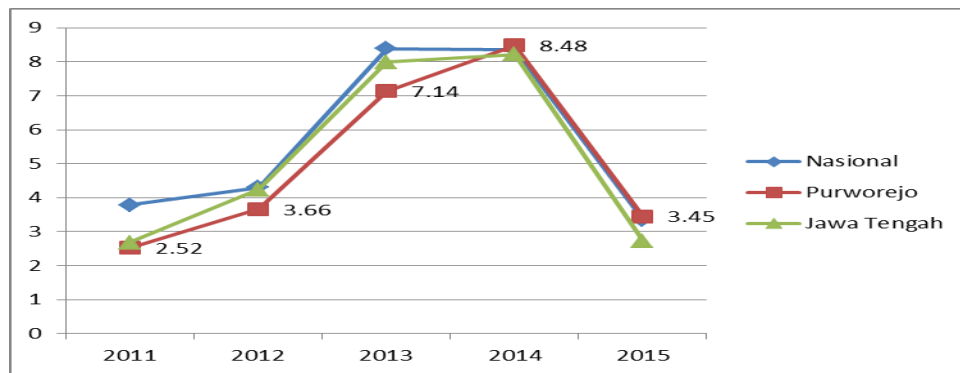


- 3) Maju Tapi Tertekan, dimana pendapatan perkapita tinggi (diatas rata-rata Kabupaten) namun pertumbuhan ekonominya rendah (dibawah rata-rata Kabupaten)  
Termasuk dalam kelompok ini adalah Kecamatan Purwodadi
- 4) Kurang Berkembang, dimana pendapatan perkapita maupun pertumbuhan ekonomi kedua-duanya rendah (dibawah rata-rata Kabupaten).  
Termasuk dalam kelompok ini adalah Kecamatan Ngombol, Bagelen, Kaligesing, Butuh, Pituruh, Kemiri, Bruno, Gebang, Loano, Bener.

Kondisi perekonomian daerah tidak bisa lepas dari pengaruh inflasi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, terutama pengaruh kebijakan makro oleh pemerintah secara nasional. Inflasi menunjukkan tingkat perkembangan harga serta kestabilan perekonomian di suatu wilayah. Dengan mencermati tingkat inflasi yang terjadi di suatu wilayah tertentu dari waktu ke waktu akan diketahui tingkat perkembangan harga dan kestabilan perekonomian di wilayah tersebut.

Inflasi Kabupaten Purworejo sepanjang tahun 2015 cukup baik yaitu mencapai 3,45%, jauh lebih rendah dari kondisi tahun 2014 yang sebesar 8,48%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat perubahan harga di Purworejo pada tahun 2015 lebih stabil apabila dibandingkan dengan tahun 2014. Perkembangan inflasi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebagaimana tampak dalam gambar 2.8.

Gambar 2.8  
Laju Inflasi Kabupaten Purworejo Tahun 2011 – 2015



ber: Badan Pusat Statistik (BPS) & Bappeda Purworejo, 2011-2015

Inflasi pada tahun 2015 secara umum dipengaruhi oleh perubahan harga komoditas dari tujuh kelompok barang dan jasa, yaitu kelompok bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok & tembakau, Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar, Sandang, Kesehatan, Pendidikan, Rekreasi & Olahraga, dan kelompok Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan. Distribusi inflasi per kelompok barang dan jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7.  
Inflasi Kabupaten Purworejo menurut Kelompok Barang dan Jasa Tahun 2011-2015

No.	Kelompok Barang dan Jasa	2011	2012	2013	2014	2015
1	Bahan Makanan	3,11	3,52	13,80	9,49	3,34
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	2,53	8,09	2,94	8,52	7,30
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan bakar	2,48	2,34	5,17	6,81	6,99
4	Sandang	7,03	1,93	2,25	4,35	0,94
5	Kesehatan	2,03	3,99	1,93	2,92	1,50
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	2,15	1,59	0,64	0,00	2,15
7	Transport, Komunikasi dan Jasa keuangan	0,51	1,13	11,37	16,18	2,94
Inflasi Umum		2,52	3,66	7,14	8,48	3,45

Sumber: Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Purworejo dari beberapa tahun terbitan.

Secara detil mengenai Inflasi Kabupaten Purworejo menurut bulan dan kelompok barang dan jasa tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8.  
Inflasi Kabupaten Purworejo menurut Bulan dan Kelompok Barang dan Jasa Tahun 2015

Bulan	Bahan Makanan	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	Sandang	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan
Januari	-2,57	-0,16	2,54	0,16	0,00	0,00	-4,23
Februari	-3,19	1,78	2,46	0,20	0,28	0,00	-4,23
Maret	-3,61	2,36	4,41	0,33	0,28	0,00	-4,23
April	-3,58	3,30	4,31	0,05	0,28	0,00	-4,23
Mei	-5,00	4,45	5,96	0,02	0,28	0,00	-4,23
Juni	-3,59	6,53	5,88	0,23	1,40	0,00	-4,23
Juli	0,93	6,05	6,04	0,26	1,40	0,47	-1,29
Agustus	1,35	5,89	6,43	0,75	1,50	-2,15	-2,63
September	1,53	5,89	6,43	0,87	1,50	-2,15	-2,63
Oktober	-0,52	6,85	6,43	0,91	1,50	-2,15	-2,63
November	-0,17	6,85	6,99	0,93	1,50	-2,15	-2,94
Desember	3,34	7,30	6,99	0,94	1,50	-2,15	-2,94

Sumber: *Indek Harga Konsumen dan Inflasi Kota Purworejo Tahun 2015*

Perkembangan laju inflasi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sekitar, Empat Kota Survey Biaya Hidup (SBH), Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9.  
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sekitar, Empat Kota Survey Biaya Hidup (SBH), Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2014

No.	Daerah	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kab. Purworejo	2,52	3,66	7,14	8,48	3,45
2.	Empat Kota SBH					
	Purwokerto	3,40	4,73	8,50	7,09	2,52
	Surakarta	1,93	2,87	8,32	8,01	2,56
	Semarang	2,87	4,85	8,19	8,53	2,56
	Tegal	2,58	3,09	5,80	7,40	3,95
3.	Provinsi Jawa Tengah	2,68	4,24	7,99	8,22	2,73
4.	Nasional	3,79	4,30	8,38	8,36	3,35

Sumber:

### 2.2.2. Karakteristik Ekonomi Wilayah

Karakteristik suatu wilayah yang dapat pula menjadi salah satu penyebab terjadinya kesenjangan yang diantaranya tampak dalam kekuatan masing-masing sektor produksinya. Demikian juga mengenai aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Purworejo yang secara administratif tersebar ke dalam 16 wilayah Kecamatan. Tampak bahwa sebagian besar wilayah secara struktural didominasi oleh agrikultural, namun beberapa wilayah sudah mulai bergerak pada sektor manufaktur dan jasa.

Berdasar struktur produksi tiap-tiap wilayah tersebut, maka hampir semua kecamatan telah mengalami pergeseran struktur ekonomi. Sektor primer (agraris) perlahan bergeser ke sector sekunder (manufacture) dan sector tersier (jasa).

### 2.2.3. Upaya Pengembangan Wilayah

Pembangunan wilayah telah dilakukan pemerintah daerah melalui program kegiatan yang dikelola oleh satuan kerja perangkat daerah maupun melalui bantuan sosial kemasyarakatan dan hibah dari pemerintah daerah langsung kepada masyarakat.

Secara umum alokasi pada beberapa wilayah tampak relatif lebih besar dari wilayah lain. Pada beberapa skema bantuan memang tidak dapat didistribusikan merata untuk semua wilayah namun disesuaikan dengan jumlah kelompok sasaran yang ada di masing-masing wilayah. Misal untuk Dana Alokasi Untuk Desa didistribusikan sesuai dengan jumlah desa yang ada dalam suatu wilayah. Distribusi bantuan kemasyarakatan, serta bantuan sosial pada tahun 2016 sudah relatif terdistribusi ke 16 wilayah, namun demikian tetap ada wilayah yang alokasinya relatif sangat kecil dibanding wilayah lainnya. Yang relatif lebih besar pada satu wilayah perlu untuk dioptimalkan lagi dari sisi pemerataannya pada periode yang akan datang.

Tidak hanya mempertimbangkan proposal yang masuk namun secara proaktif perlu disusun pola alokasi yang lebih merata ke semua wilayah.

Kinerja pelaksanaan kegiatan di kecamatan selama tahun 2016 secara umum dari sisi kuantitas (% realisasi output) cukup baik, namun dari sisi kualitas terdapat beberapa kegiatan yang kurang optimal dalam pelaksanaannya.

Beberapa upaya lain dalam hal peningkatan kapasitas wilayah, terdapat dalam program dan kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh beberapa satuan kerja perangkat daerah. Meliputi peningkatan sarana prasarana jalan, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan dan kelautan maupun perindustrian dan perdagangan.

## **BAB II**

### **VISI – MISI – TUJUAN – ARAH**

#### **I. VISI DAN MISI KABUPATEN PURWOREJO**

##### **A. VISI**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta proaktif.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Instansi pemerintah.

**Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang semakin sejahtera berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan yang berwawasan budaya, lingkungan, dan ekonomi kerakyatan**

##### **B. MISI**

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan berhasil baik. Dengan pernyataan visi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu yang akan datang.

Misi Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religius dan demokratis.
2. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan.
3. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal.
4. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya, dan olahraga.
5. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan.
6. Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.

7. Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang;

## **2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH**

### **1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Kebijakan ekonomi makro nasional jangka menengah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 diarahkan untuk pencapaian sasaran-sasaran makro tahun 2017, diantaranya adalah pertumbuhan PDB Tahun 2017 ditargetkan 7,1 % ; PDB per kapita Rp 58.489.000,00 ; laju inflasi ditargetkan pada 4% ; nilai tukar nominal Rp 12.100/US\$ ; Tingkat Kemiskinan 8,5 – 9,5%; Tingkat Pengangguran 5,0 – 5,3 %.

Di lingkup Provinsi Jawa Tengah, kebijakan ekonomi daerah tahun 2016 diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah, pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi, penciptaan kondusivitas wilayah, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian lingkungan, percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui :

1. Pengembangan sarana prasarana perekonomian daerah
2. Konektivitas antara pusat pertumbuhan ekonomi tinggi dengan rendah dengan meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang semakin baik
3. Meningkatkan daya saing produk UMKM/IKM berbahan baku lokal
4. Peningkatan akses pasar dan promosi bagi potensi unggulan di daerah
5. Peningkatan iklim usaha kondusif terutama bagi investasi yang menyerap tenaga kerja yang mendukung ekonomi kerakyatan

6. Peningkatan kelancaran arus distribusi barang kelompok kebutuhan masyarakat dan barang strategis serta kelompok jasa

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat factor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil.

Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada kelesuan pasar ekspor. Capaian indikator ekonomi makro daerah adalah sebagai berikut :

## **2. Arah kebijakan Keuangan Daerah**

Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pengelolaan pendapatan daerah yaitu :

- 1) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi atas sumber-sumber pendapatan yang masuk dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi untuk optimalisasi atas sumber-sumber pendapatan yang masuk dalam kelompok Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- 3) Mengoptimalkan pengelolaan aset-aset daerah.



Kebijakan terkait dengan optimalisasi PAD ditindaklanjuti dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Merevisi peraturan daerah terkait pendapatan daerah sesuai perkembangan yang terjadi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;
- 2) Menyusun peraturan daerah yang merupakan sumber PAD baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Membuat target peningkatan PAD dengan mempertimbangkan data realisasi tahun sebelumnya, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi pencapaian masing-masing;
- 4) Mengoptimalkan kinerja penerimaan dari masing-masing SKPD penghasil PAD;
- 5) Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- 6) Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah melalui sosialisasi dan pemberian hadiah;
- 7) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pajak dan retribusi daerah yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- 8) Meningkatkan manajemen Badan Usaha Milik Daerah agar lebih efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mempunyai daya saing yang tinggi sehingga memberikan kontribusi pada PAD;

Meningkatkan pendayagunaan aset daerah termasuk kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga mampu mendukung peningkatan

## **BAB III**

### **STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH**

Rencana pembangunan secara keseluruhan adalah merupakan sinergitas rencana antara rencana pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten sesuai dengan kapasitas serta tingkat kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara umum strategi pembangunan nasional menggariskan hal-hal sebagai berikut :

1. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:
  - a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
  - b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan.
  - c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
2. Tiga Dimensi Pembangunan;
  - a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif.
  - b. Dimensi pembangunan sektor unggulan yaitu sector Kedaulatan pangan, Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, Kemaritiman dan kelautan, serta Pariwisata dan industri.
  - c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil

- kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antarkelompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah,
3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi perlu tersebut antara lain :Kepastian dan penegakan hukum;Keamanan dan ketertiban; Politik dan demokrasi; dan Tetakelola dan reformasi birokrasi.
  4. Quickwins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya).

#### Sasaran Prioritas pembangunan Daerah Tahun 2017

Sasaran prioritas pembangunan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi
- b. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
- c. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olah raga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
- e. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan sebuah penunjuk arah sekaligus alat kendali penyelenggaraan pemerintahan bagi masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Dengan telah tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih terarah dan terukur (akuntabel) kualitas dan kuantitasnya. Perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan ini nantinya akan diukur dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat akhir tahun anggaran.

Rencana kinerja tahunan daerah Kabupaten Purworejo tahun 2017 telah disusun dengan seoptimal mungkin melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah daerah, agregasi aspirasi berbagai lapisan masyarakat serta memfokuskan program dan kegiatan

Prioritas dalam implementasinya tidak selalu berupa peningkatan alokasi dana tetapi dapat pula berupa penyempurnaan / perbaikan design pelaksanaan kegiatan yaitu design yang dapat memaksa pelaksanaan kegiatan terarah menjadi lebih efektif yaitu mengena pada sasaran atau tujuan yang diharapkan. Upaya ini akan optimal apabila menjadi titik tolak dalam tahap perencanaan berikutnya yaitu perencanaan anggaran dan teknis kegiatan. Secara lebih detail , matrik sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2017 adalah sebagaimana terlampir.

BUPATI PURWOREJO

**AGUS BASTIAN, SE, MM.**

## RENCANA KINERJA TAHUNAN DAERAH

**KABUPATEN : PURWOREJO**

**TAHUN ANGGARAN : 2017**

No	Sasaran	Indikator	Target Kinerja
1	2	3	4
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	5,76 %
2	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia	71.63
3	Menurunnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	Persentase Penduduk Miskin	11.3%
		Gini Ratio	0,3
4	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.9
5	Menurunnya kesenjangan antar wilayah	Indeks Williamson	0,360
6	Meningkatnya semangat kehidupan beragama	Cakupan layanan koordinasi dan fasilitasi kehidupan beragama	100%
7	Meningkatnya partisipasi publik dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan	Cakupan layanan komunikasi publik	100%
8	Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	Persentase cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu	100%
9	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase cakupan peningkatan daya saing tenaga kerja	100%
10	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	4.54%
11	Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan	85.70%
12	Meningkatnya usaha agribisnis dalam	Subsistem agroinput dan agroonfarm	100%

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target Kinerja</b>
1	2	3	4
	pengelolaan potensi pertanian	Nilai Tukar Petani (NTP)	103,68
		Subsistem agroprosesing dan agromarketing	40%
13	Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	20%
14	Berkembangnya industri kecil dan menengah	Pertumbuhan PDRB sektor industri	5,63%
15	Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan UMK (Usaha Mikro dan Kecil)	Persentase Pertumbuhan koperasi (baru, aktif, sehat)	83%
		Persentase pertumbuhan UMK	5%
16	Meningkatnya nilai investasi	Pertumbuhan nilai investasi	2%
17	Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	5,27 %
18	Terwujudnya interkoneksi antar pusat kegiatan dan produksi di kabupaten	Persentase interkoneksi antar pusat kegiatan dan produksi di kabupaten	100%
19	Meningkatnya cakupan layanan transportasi yang efektif dan efisien	Tingkat kelancaran, keamanan, dan keselamatan transportasi	79%
20	Meningkatnya cakupan air minum, sanitasi dan rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase cakupan air minum	93.35%
		Cakupan akses sanitasi layak	91,68%
		Persentase pengangkutan sampah	64.67%
		Persentase Luas titik genangan yang tertangani	43.34%
		Rasio permukiman layak huni	67.81%
21	Meningkatnya kesesuaian arahan penggunaan lahan	Persentase peningkatan kesesuaian arahan penggunaan lahan	88.32%
22	Meningkatnya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, perkotaan Purworejo-Kutoarjo dan border city.	Persentase pengembangan kawasan cepat tumbuh, perkotaan Purworejo-Kutoarjo dan border city	47,9%
23	Meningkatnya pelayanan irigasi	Persentase kinerja layanan irigasi	62,18%
24	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	62,69

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target Kinerja</b>
1	2	3	4
25	Meningkatnya partisipasi pelaku budaya daerah	Cakupan pelaku budaya dalam even budaya daerah	10%
26	Meningkatnya pembinaan dan perlindungan asset budaya	Cakupan Pembinaan asset budaya	100%
		Cakupan perlindungan asset budaya	32%
27	Meningkatnya prestasi seni dan budaya daerah	Pertumbuhan prestasi seni dan budaya daerah	10.00%
28	Meningkatnya prestasi Pemuda dan olahraga	Pertumbuhan prestasi pemuda dan olahraga	10%
29	Meningkatnya ketersediaan wahana peningkatan prestasi seni budaya	Optimalnya pemanfaatan wahana pembinaan seni budaya	0%
30	Meningkatnya ketersediaan wahana peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	Optimalnya pemanfaatan wahana pembinaan pemuda dan olahraga di Heroes Park dan Sport center WR Supratman	0%
31	Meningkatnya Aksesibilitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	6.9
		Angka harapan lama sekolah	13.42
32	Terwujudnya Satuan pendidikan berbasis e-learning	Cakupan wilayah penerapan e-learning di tingkat SD	100%
		Cakupan wilayah penerapan e-learning di tingkat SMP	50%
33	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	74.12
		Angka Kematian Ibu	73 / 100.000 KH
		Angka Kematian Balita	12 / 1.000 KH
		Angka Kematian Bayi	11.2 / 1.000 KH
		Prevalensi Gizi Buruk	0.08%
		Eliminasi malaria API Kasus indogenius	<1 65%
34	Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan asset daerah	Opini Hasil Audit BPK	WTP
35	Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu	Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan tepat waktu	96

No	Sasaran	Indikator	Target Kinerja
1	2	3	4
36	Meningkatnya kapasitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintahan	Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Purworejo	2,18
37	Penguatan Sistim Inovasi Daerah (SIDa)	Persentase penguatan SIDa	100%
38	Meningkatnya kompetensi aparatur	Persentase aparat yang memiliki kapasitas sesuai standard	91%
39	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif	Cakupan layanan perumusan kebijakan daerah.	100%
		Persentase BUMD sehat	100%
		Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	80%
		Persentase penerapan SOP Pelayanan Publik dan perangkat daerah	100%
		Cakupan pelayanan perangkat daerah	100%
		Cakupan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%
40	Optimalisasi fungsi camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase penyelesaian permasalahan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan	100%
41	Terselenggaranya dukungan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD	Persentase terwujudnya pelaksanaan fungsi DPRD yang tepat waktu	100%
42	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang berbasis Teknologi Informasi.	Persentase Perangkat Daerah memiliki website yang interaktif	95%
		Cakupan layanan cybercity	100%
		Cakupan layanan Sistem Informasi Desa	100%
		Cakupan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	92%
43	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Cakupan layanan pengamanan informasi persandian	100%



<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target Kinerja</b>
1	2	3	4
44	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	94.20%
		Persentase kepemilikan KTP-elektronik	93.50%
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	15.00%
		Persentase kepemilikan akta kelahiran bagi bayi yang lahir pada tahun berjalan	84.00%
		Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran bagi penduduk usia 0-18 tahun	80.00%
		Persentase kepemilikan akte kematian	40%
		Persentase kepemilikan akta perkawinan non muslim	100%
45	Meningkatnya layanan penanganan masalah pertanahan	Persentase penanganan permasalahan pertanahan	100%
46	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Angka pertumbuhan penduduk	0.36
		Cakupan keluarga yang mendapat layanan UPPKS	2,70%
		Cakupan keluarga yang mendapat layanan Tri Bina	61,38%
47	Meningkatnya pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	100%
48	Optimalnya pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana	100%
		Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten	34.2%
49	Meningkatnya layanan tramtibumlinmas	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	100%
50	Meningkatnya kesetaraan gender , perlindungan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93.00
		Indeks Pemberdayaan	68,86

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target Kinerja</b>
1	2	3	4
	perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak	Gender (IDG) Cakupan layanan pemenuhan hak anak (indikator pemenuhan hak anak)	72
51	Meningkatnya minat baca masyarakat	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	2,76%
52	Meningkatnya tertib kearsipan daerah	Persentase tertib kearsipan lembaga pemerintah daerah	70%
53	Meningkatnya layanan ketersediaan statistik sektoral dan daerah yang akurat	Tingkat ketersediaan data statistik sektoral dan daerah yang akurat	100%
54	Meningkatnya layanan informasi dan fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi	Cakupan layanan informasi dan fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi	100%
55	Meningkatnya fasilitasi serta layanan data dan informasi urusan ESDM	Cakupan layanan informasi dan fasilitasi ESDM	100%
56	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	100%
57	Meningkatnya status desa	Persentase desa cepat berkembang	66.10%
		Persentase desa berkembang	23.88%
		Persentase desa kurang berkembang	10.02%
58	Cakupan layanan pembangunan kawasan perdesaan	Persentase kawasan perdesaan yang tertangani	100%

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN, SE, MM

	<b>Program</b>	<b>Aggaran (Rp.)</b>
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	645.572.900,00
2.	Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	23.027.323.900,00
3.	Program Pendidikan Masyarakat	118.947.000,00
4.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7.650.716.100,00
5.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.535.948.900,00
6.	Program E-Learning	3.194.000.000,00
7.	Program Kefarmasian, Pengawasan Obat dan Makanan	8.345.763.000,00
8.	Program Upaya Kesehatan Perorangan	33.583.747.050,00
9.	Program Pelayanan Promosi Kesehatan	686.071.000,00
10.	Program Pelayanan Skrining dan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Daur Kehidupan	17.577.380.900,00
11.	Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Respon Verifikasi terhadap SKDR	5.295.343.200,00
12.	Program Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Menular	2.111.412.000,00
13.	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	11.836.198.000,00
14.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	12.011.602.800,00
15.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	141.020.000.000,00
16.	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	73.230.298.500,00

17.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	17.643.042.500,00
18.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase	13.825.000.000,00
19.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Bangunan Gedung	138.786.000.000,00
20.	Program Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi	80.000.000,00
21.	Program Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis	29.536.300.000,00
22.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih	4.096.212.000,00
23.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah	1.000.000.000,00
24.	Program Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh	1.250.000.000,00
25.	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.415.000.000,00
26.	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	15.000.000,00
27.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	220.000.000,00
28.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	100.000.000,00
29.	Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat	545.000.000,00
30.	Program Pemeliharaan Keamanan, ketertiban dan Ketentraman Masyarakat serta pencegahan tindak kriminal	2.619.234.400,00
31.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	471.800.000,00
32.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah	4.140.319.800,00
33.	Program Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	2.468.238.000,00
34.	Program Penghargaan Kepahlawanan	78.000.000,00
35.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.018.393.250,00
36.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	370.890.000,00
37.	Program Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	460.808.700,00
38.	Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak	861.000.000,00
39.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	722.000.120,00
40.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pertanahan	154.500.000,00
41.	Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah	4.327.475.000,00
42.	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan	553.820.000,00

43.	Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan	3.135.200.000,00
44.	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	3.828.537.700,00
45.	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.350.493.700,00
46.	Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin	155.500.000,00
47.	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	50.000.000,00
48.	Program Keluarga Berencana (KB)	2.418.003.200,00
49.	Program Keluarga Sejahtera	1.043.000.000,00
50.	Program Peningkatan Kepesertaan KB bagi Pasangan Usia Subur Miskin	110.000.000,00
51.	Program Pengelolaan Transportasi Darat	24.779.705.820,00
52.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.418.250.000,00
53.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	<u>583.500.000,00</u>
54.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil	1.140.000.000,00
55.	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	742.134.000,00
56.	Program Peningkatan Promosi Investasi	452.989.600,00
57.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	690.900.800,00
58.	Program Pengembangan Kepemudaan	573.300.000,00
59.	Program Pengembangan Wahana Pemuda dan Olahraga	161.700.000,00
60.	Program Penyusunan Statistik	484.000.000,00
61.	Program Penyelenggaraan Persandian	<u>13.500.000,00</u>
62.	Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya	1.547.029.000,00
63.	Program Pelestarian Pengelolaan Nilai Sejarah, Nilai Budaya, dan Kepurbakalaan	2.399.321.000,00
64.	Program Pembinaan Seni Budaya dan Adat Daerah	178.137.000,00
65.	Program Pembinaan Prestasi Seni dan Organisasi	405.063.500,00
66.	Program Pengembangan Wahana Seni Budaya	190.223.800,00
67.	Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	526.000.000,00
68.	Program Pengelolaan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah	1.091.000.000,00
69.	Program Peningkatan Produksi Perikanan	53.970.000,00

70.	Program Agribisnis Komoditas Unggulan Perikanan	149.970.000,00
71.	Program Pengembangan Destinasi, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4.545.500.000,00
72.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	765.160.000,00
73.	Program Peningkatan Produksi Peternakan	391.278.200,00
74.	Program Peningkatan Produksi/Produktivitas Perkebunan	130.000.000,00
75.	Program Penerapan Teknologi Pertanian	252.158.000,00
76.	Program Pemberdayaan Penyuluh dan Peningkatan Penyuluhan Pertanian	616.000.000,00
77.	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian	3.218.214.000,00
78.	Program Agribisnis Komoditas Unggulan Pertanian dan Peternakan	3.181.200.900,00
79.	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Energi Sumber Daya Mineral	105.000.000,00
80.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Daerah	243.817.000,00
81.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	10.165.416.000,00
82.	Program Peningkatan Promosi Perdagangan	744.982.000,00
83.	Program Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah	716.625.000,00
84.	Program Penyelenggaraan Transmigrasi	340.000.000,00
85.	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	6.596.568.500,00
86.	Program Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah	841.863.000,00
87.	Program Koordinasi Perangkat Daerah	2.113.567.450,00
88.	Program Pelayanan Komunikasi Publik	735.900.000,00
89.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Kehidupan Beragama	1.245.000.000,00
90.	Program Dukungan Penyelenggaraan Fungsi DPRD	18.002.588.160,00
91.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.291.910.494
92.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	11.319.368.402
93.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.656.139.011
94.	Program penyusunan data dasar pembangunan	1.354.175.900
95.	Peningkatan sumber daya aparatur	710.350.400

96.	Program koordinasi tingkat kecamatan	1.702.174.200
97.	Program pembinaan desa/kelurahan	8.474.690.600
98.	Program pelayanan masyarakat	171.904.500

Jumlah anggaran Tahun 2017 sebesar **Rp.2.170.461.184.395,-**

Purworejo, 3 Januari 2017

BUPATI PURWOREJO

**AGUS BASTIAN, SE, MM**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
1.	<b>BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>		
	1. Meningkatnya pendidikan usia dini	Angka Partisipasi Kasar (APK)	
		1. APK PAUD 4-6 tahun	71,56%
		2. APK PAUD 0-6 tahun	32,40%
		3. Prosentase ketersediaan kurikulum muatan local PAUD	100,00%
		4. Prosentase keterlaksanaan kurikulum muatan local PAUD	100,00%
		5. Prosentae ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran PAUD	42,53%
	2. Meningkatnya pendidikan masyarakat	1. Prosentase angka buta huruf (penurunan)	0,19%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
		2. Persentase lembaga kursus dan pelatihan berkinerja A dan B	50%
	3. Meningkatnya wajib belajar Sembilan tahun.	1. APK SD/SDLB/MI/Paket A	100,00%
		2. APM SD/SDLB/MI/Paket A	
		3. APK SMP/MTS/ Paket B/SMPLB	99,00%
		4. Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dg berjalan kaki yaitu max. 3 km untuk SD, 6 km untuk SMP dari kelompo permukiman permanen di daerah terpencil	100,00%
		5. Di setiap SD dan SMP tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	51.56%
		6. % Ruang kelas SD sesuai standar nasional pendidikan dan memenuhi Keamanan, Kebersihan, Keindahan	76.59%
		7. % Ruang kelas SMP sesuai standar nasional pendidikan dan memenuhi Keamanan, Kebersihan, Keindahan	91.20%
		8. % SD yang memiliki perpustakaan	81.93%
		9. % SMP yang memiliki Laboratorium Penunjang	83.15%
		10. % SD yang memiliki sanitasi layak	100.00%
		11. % SMP yang memiliki sanitasi layak	100.00%
		12. % ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran SD/SMP	81.39%
		13. Angka putus sekolah	
		a. Jenjang SD/SDLB/MI	0.03%
		b. Jenjang SMP/SMPLB/MT's	0.06%
		b. Jenjang SMA/SMK/MA	0.10%



<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		14. Angka Kelulusan SD/SDLB/MI	
		a. Angka Kelulusan SD/SDLB/MI	100.00%
		b. Angka Kelulusan SMP/MTs/SMPLB	100.00%
		c. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	100.00%
		15. Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A	100.00%
		16. Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B	100.00%
		17.% Ketersediaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	100.00%
		18. % Keterlaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	100.00%
		19. Nilai rata rata Ujian Nasional	
		a. SD/MI	7.00
		b. SMP/MTs	5.75
		c. Pendidikan Menengah	6.50
		20. % Pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang sesuai standar	66.00%
		22. Angka Melanjutkan	
		Jenjang SMP/MTs	100%
		Jenjang SMA/SMK/MA	100%
	4. Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	1. Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Pendidik PAUDNI	2,579
		2. Ketersediaan Pendidik yang telah berkualifikasi S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik PAUDNI	525
		3. Ketersediaan Tenaga Kependidikan Non Guru PAUDNI	729
		4. Di setiap SD tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;	96.00%
		5. Di setiap SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap	94.00%

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		rumpun mata pelajaran;	
		6. Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;	89.00%
		7. Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;	55.00%
		8. Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;	42.00%
		9. Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	66.00%
		10. kepala SMP berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	87.00%
		11. Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	100.00%
	5. Manajemen Pelayanan Pendidikan	Prosentase sekolah yang menetapkan RAPBS tepat waktu	100%
	6. Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah	7.8
		2. Angka harapan lama sekolah	13.6
	7. Terwujudnya satuan pendidikan berbasis e- learning	1. Cakupan wilayah penerapan e- learning di TK, SD	16 Kec.

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		2. Cakupan wilayah penerapan e- learning TK, SMP	8 Kec.
	8. Terselenggaranya pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	1. Jumlah prestasi olah raga	30
		2. Jml penyelenggaraan kejuaraan kejuaraan olah raga tingkat daerah kabupaten	14
		3. Jumlah even olah raga untuk masyarakat	2
	9. Meningkatnya wahana peningkatan prestasi pemuda dan olah raga	Tersentralnya tempat pembinaan pemuda dan olah raga yout center argo putro dan sport center WR. Supratman	0%
	10. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	Pertumbuhan prestasi pemuda dan olah raga	10%
	11. Meningkatnya pengembangan kepemudaan	1. Pemuda pelopor kabupaten	6
		2. Organisasi kepemudaan aktif	20
		3. Prosentase organisasi kepramukaan yg aktif	100%
		4. Penyelenggaraan kejuaraan olah raga tingkat daerah kabupaten	14
		5. Prosentase klub/organisasi olah raga yg aktif	87%
	12. Meningkatnya wahana peningkatan prestasi pemuda dan olah raga	Tersentralnya tempat pembinaan pemuda dan olah raga yout center argo putro dan sport center WR. Supratman	0%
<b>2.</b>	<b>BIDANG KESEHATAN</b>		
	1. Meningkatnya derajat kesehatan	1. Usaha harapan hidup	74.12

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	masyarakat		
		2. Angka kematian ibu	101,5/100.000 KH
		4. Angka kematian balita	12/1.000 KH
		5. Angka kematian bayi	13/1.000 KH
		6. Prevalensi gizi buruk	0,08%
		7. Eliminasi malaria	< 1
		8. Kasus Indogenius	65%
	2. Meningkatnya pelayanan promosi kesehatan	1. Prosentase Satuan Pendidikan Dasar mendapatkan Promosi Kesehatan	100%
		2. Prosentase Satuan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu melaksanakan Promosi Kesehatan	100%
		3. Prosentase Satuan Puskesmas melaksanakan Promosi Kesehatan untuk Pemberdayaan dibidang kesehatan	100%
	3. Pelayanan skrining dan pelayanan kesehatan berdasarkan daur kehidupan	1. Prosentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar	100%
		2. Prosentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan	100%
		3. Prosentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan	100%
		4. Prosentase Usia bawah lima tahun ( Balita ) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	100%

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		Standar di Fasilitas Kesehatan	
		5. Prosentase Siswa Satuan Pendidikan dasar mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%
		6. Prosentase Usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%
		7. Prosentase Usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%
		8. Prosentase Usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%
		9. Prosentase Usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%
		10. Penanggulangan Awal Hipertensi	100%
	4. Meningkatnya pelayanan pemeriksaan penyakit menular	1. Prosentase Terduga Tuberculosis mendapatkan pemeriksaan Tuberculosis sesuai standar	100%
		2. Jumlah kasus yang ditemukan	107/100,000 penduduk
		3. Jumlah kasus yang ditangani	70% kasus yang ditemukan
		4. Jumlah kasus sembuh	80% yang ditangani
		5. Prosentase Terduga HIV dan AIDS mendapatkan pemeriksaan HIV dan AIDS sesuai standar	100%
		6. Penurunan Annual Positive Insidence Malaria	0,09 permil
		7. Persentase Penderita DBD tertangani	100%
		8. Persentase ISPA, Diare dan	100%

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		penyakit menular lainnya	
	5. Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan dan respon verifikasi terhadap SKDR	1. Prosentase satuan Pendidikan dasar mendapatkan pelayanan Kesehatan Lingkungan oleh Puskesmas	100%
		2. Prosentase Pasar rakyat mendapatkan pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%
		3. Prosentase Respon Verifikasi terhadap SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) dalam waktu kurang dari 24 jam	100%
		4. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	40%
	6. Meningkatnya Kefarmasian, Pengawasan Obat dan Makanan	1. Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan	100%
		2. Prosentase pengawasan obat dan makanan	40%
		3. Prosentase penggunaan obat rasional	70%
		4. Cakupan Pelayanan Sertifikasi Produk Pangan	100%
	7. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	1. Cakupan Masyarakat Maskin Non Quota Yang mendapat pelayanan Kesehatan	100%
		2. Cakupan Masyarakat Maskin Yang mendapat pelayanan Kesehatan rujukan	19%
	8. Upaya Kesehatan Perorangan	1. Jumlah Puskesmas terakreditasi	27 Puskesmas
		2. Jumlah Rumah Sakit Umum Type C	1
		3. Persentase Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai Standar	100%

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		4. Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan Yang teregristrasi	100%
		5. Cakupan Tenaga Kesehatan Yang teregristrasi	100%
	9. Peningkatan pelayanan kesehatan	1. Persentase cakupan pelayanan kesehatan Rumah sakit	82.00%
		2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 3 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten / kota	83.00%
<b>3</b>	<b>BIDANG PARIWISATA DAN BUDAYA</b>		
	1. Meningkatnya partisipasi pelaku budaya daerah	Cakupan pelaku budaya dalam even budaya daerah	10%
	2. Meningkatnya pembinaan dan perlindungan asset budaya	Cakupan pembinaan asset budaya	100%
	3. Meningkatnya prestasi seni dan budaya daerah	Pertumbuhan prestasi seni dan budaya daerah	10%
	4. Meningkatnya ketersediaan wahana peningkatan prestasi seni budaya	Tersentralnya tempat pembinaan seni budaya di arct center	50%
	5. Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	1. Cakupan gelar seni 75%	100%
		2. Misi kesenian 100%	100%
	6. Terselenggaranya pembinaan seni budaya dan adat daerah	1. Cakupan kajian seni 50%	60%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
		2. Cakupan fasilitas seni 30%	85,71%
		3. Cakupan pembinaan nilai sejarah, adat dan tradisi	12
		4. Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	85,71%
		5. Cakupan organisasi 34%	100%
	7. Meningkatnya destinasi, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif	Kinerja pengembangan wisata	66%
<b>4.</b>	<b>BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG</b>		
	1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh wilayah	Proposal dalam kondisi mantap di seluruh wilayah	77,35%
		Prosentase jembatan dalam kondisi baik	97,24%
	2. Meningkatnya cakupan air minum sanitasi dan rumah layak huni bagi masyarakat	Prosentase cakupan air minum	93.35%
		1. Prosentase cakupan air limbah	91.68%%
		2. Prosentase pengangkutan sampah	64.07%%
		3. Prosentase luas titik genangan yang tertangani	43.34%
		4. Rasio permukiman layak huni	67.81%
		5. Rasio rumah layak huni	84.52%
		6. Rasio luas permukiman layak huni	68.81%
		7. Rasio luas permukiman yang tertata	37.76%
	3. Meningkatnya kesesuaian arahan	Prosentase peningkatan kesesuaian arahan penggunaan lahan	88.32%



<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	penggunaan lahan		
	4. Meningkatnya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, perkotaan Purworejo – Kutoarjo dan Border city	Prosentase pengembangan kawasan cepat tumbuh, perkotaan Purworejo – Kutoarjo dan Border city	25%
	5. Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih	1. Cakupan akses air bersih	90.77%
		2. Persentase cakupan layanan air minum Perkotaan	89.25%
		3. Persentase cakupan layanan air minum Perdesaan	88.13%
	6. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1. Prosentase sampah yang tertangani	42.00%
		2. Prosentase TPA yang memenuhi kriteria dan dioperasikan secara layak	100.00%
	7. Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah	1. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	91.32%
		2. Cakupan akses sanitasi layak	91.21%
	8. Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase	Prosentase Saluran drainase dalam kondisi baik	30.83%
	9. Pengembangan dan Pengelolaan Bangunan Gedung	1. Prosentase Bangunan gedung Negara dalam Kondisi baik	88.00%
		2. Prosentase bangunan gedung yang tertangani kelaikan fungsinya	25.00%
	10. Penataan	1. Prosentase penataan bangunan	40.00%

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Bangunan dan Lingkungan	dan lingkungan di kawasan perkotaan	
		2. Prosentase kesesuaian bangunan dengan RTBL	100.00%
	11. Pembangunan Jalan dan Jembatan	1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	75.70%
		2. Peningkatan kapasitas jalan kabupaten	10.00%
	12. Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	1. Tersedianya informasi rencana tata ruang	27.68%
		2. Terselenggaranya pemanfaatan ruang kabupaten sesuai rencana	99.99%
		3. Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten	100.00%
	13. pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Prosentase luas Ruang Terbuka Hijau publik di wilayah perkotaan	18.42%
	14. Pengembangan Wilayah Terpadu	Tertanganinya pembangunan infrastruktur di kawasan strategis (Minapolitan, Agropolitan, Perbatasan (KSCT), Purwokulon, Kutoarjo-Purworejo, Kemiri, Purwodadi, kawasan pariwisata, kawasan industri)	35.60%
	15. Pembangunan Trotoar dan Penerangan Jalan Umum	Prosentase Trotoar dalam kondisi baik	76.00%
<b>5.</b>	<b>BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEUKIMAN</b>		
	1. Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Prosentase Rumah layak Huni	86.03%

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		2. Prosentase Kebutuhan rumah (backlog rumah)	57.39%
		3. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	67.81%
	2. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	60%
	3. Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial	100%
<b>6.</b>	<b>BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>		
	1. Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian	Luasan panen komoditas pertanian (ha/tahun)	118.000
	2. Meningkatnya pemberdayaan penyuluh dan peningkatan penyuluh pertanian	Prosentase cakupan pelayanan penyuluhan (WIBI)	100%
	3. Meningkatnya produksi peternakan	Prosentase kenaikan populasi ternak besar	1%
	4. Meningkatnya agribisnis komoditas unggulan pertanian dan peternakan	Produksi padi sawah dan padi ladang per tahun	358.458 ton
	5. Meningkatnya penerapan teknologi	Prosentase peningkatan jml kelompok tani yg menerapkan kelompok tani yg menerapkan	0,71%

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	perkebunan	teknologi perkebunan (SLPHT)	
	6. Meningkatnya produksi , produktifitas perkebunan	Produksi kelapa (ton)	
		1. Produksi cengkeh(ton)	24,967.12
		2. Produksi kelapa deres dalam bentuk gula (ton)	532.05
		3. Produktifitas kakao (kg/ha)	18655,92
		4. Produktifitas karet (Kg/ha)	1193,83
		5. Produktifitas karet (Kg/ha)	849,63
		6. Produktifitas kopi (Kg/ha)	324,6891
	7. Menurunnya kemiskinan	Penanganan desa rawan/rentan pangan di Kabupaten Purworejo	6 desa
	8. Meningkatnya produksi perikanan	1. Prosentase kenaikan produksi perikanan tangkap	4%
		2. Prosentase kenaikan produksi perikanan budidaya	3%
	9. Meningkatnya agribisnis komoditas unggulan perikanan	1. Kelompok perikanan (pembenihan dan pembesaran) yg memiliki sertifikat CBIB meningkat	5
		2. Cakupan wilayah pengembangan TPI	6
		3. Event promosi perikanan meningkat	5
<b>7.</b>	<b>BIDANG PERHUBUNGAN</b>		
	Terselenggaranya transportasi	1. Cakupan ketersediaan rambu	63%

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	darat	jalan	
		2. Cakupan ketersediaan alat pengaman jalan	50%
		3. Cakupan ketersediaan marka jalan	43%
		4. Cakupan ketersediaan APILL	68%
		5. Persentase tersedianya halte yg layak fungsi pada setiap prasarana kabupaten yg telah dilayani angkutan umum	75%
		6. Prosentase kendaraan operasional perhubungan yg layak fungsi	83%
		7. Prosentase titik parkir yg terlayani	91%
		8. Persentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yg telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalankabupaten	75%
		9. Prosentase rasio ijin trayek	100%
		10. Prosentase kendaraan umum laik jalan	100%
		11. Persentase tersedianya unit pengujian kendaraan wajib uji yg layak fungsi	100%
		12. Persentase terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum	100%
		13. Persentase terpenuhinya standar keselamatan pada perlintasan sebidang	100%
<b>8.</b>	<b>BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		
	Meningkatnya komunikasi, informasi dan media	1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok	100%

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	massa	informasi	
		2. Persentase data dan informasi pemerintah yg dipublikasikan	77%
		3. Prosentase OPD yg memiliki jaringan berbasis LAN	100%
		4. Persentase pendirian tower telekomunikasi sesuai cellplan	100%
		5. Cakupan layanan teknologi informasi	100%
<b>9.</b>	<b>BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>		
	Terlaksananya pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Prosentase pemakaian kontrasepsi/peserta KB aktif (%)	82,86
		2. Prosentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi	8.0%
		3. Prosentase peserta jumlah KB mandiri	41,19%
		4. Rasio akseptor KB	9.33
		6. Prosentase remaja yang diberikan penyuluhan KRR	5,21%
<b>10.</b>	<b>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>		
	Terlaksananya pengendalian kerusakan lingkungan	Prosentase tingkat tutupan lahan berupa hutan / vegetasi terhadap luas wilayah	30%
<b>11.</b>	<b>BIDANG ADM. KEPENDUDUKAN DAN CAPIL</b>		
	1. Terlaksananya penataan adm kependudukan dan capil	Meningkatnya kualitas data base kependudukan dan capil	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
	2. Terlaksananya pelayanan adm kependudukan	Prosentase pelayanan adm kependudukan	100%
	3. Terlaksananya Pelayanan pencatatan sipil	Prosentase pelayanan pencatatan sipil	100%
<b>12.</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DAN DESA</b>		
	1. Meningkatnya Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Prosentase PMKS yang mendapatkan penanganan	1.20%
		2. Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0.02%
		2. Prosentase (%) Pembinaan Panti sosial skala kabupaten	100%
		3. Cakupan Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial yang dibina	10%
	2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	1. Desa yang sudah mengakomodir kebutuhan akses sosial, pelayanan dasar, dan pengembangan ekonomi dlm berita acara musrenbngdes	Desa berkembang = 21% Desa maju = 18%
		2. Prosentase LPMD/ yang berperan aktif dalam pembangunan desa	100%
		3. Prosentase desa yg sudah mengakomodir kebutuhan	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
		masyarakat miskin dlm hasil musrenbangdes	
		4. Prosentase desa yg terdampingi dalam pelaksanaan program kemiskinan	100%
		5. Prosentase PKK aktif di desa /kelurahan	100%
		6. Jml UEP (usaha ekonomi produktif) yang aktif	100%
		7. Prosentase BUMDes aktif	20%
		8. Prosentase pasar desa aktif	100%
		9. Prosentase UED-SPLPM (usaha ekonomi desa simpan pinjam lumbung pangan masyarakat) yg aktif	100%
		10. Jml posyandu aktif	1300
	3. Meningkatnya pengembangan kawasan pedesaan	Prosentase BKAD (badan kerja sama antar desa) aktif	100%
<b>13.</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>		
	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak	1. Prosentase penanganan tindak kekerasan pada perempuan dan anak	100%
		2. Prosentase pemenuhan perlindungan anak , kesejahteraan anak, dan hak-hak anak	78%
		3. Desa yang sudah mengakomodir kebutuhan akses sosial,	Desa berkemb



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
		pelayanan dasar, dan pengembangan ekonomi dlm berita acara musrenbangdes	ang = 21% Desa maju = 18%
		4. Prosentase LPMD/yang berperan aktif dalam pembangunan desa	100%
		5. Prosentase desa yg sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat miskin dlm hasil musrenbangdes	100%
		6. Prosentase desa yg terdampangi dalam pelaksanaan program kemiskinan	100%
<b>14.</b>	<b>BIDANG TENAGA KERJA</b>		
	1. Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	32 orang
		3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	224 orang
		4. Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	10 orang
		5. Prosentase pembinaan lembaga pelatihan kerja	34 lembaga
		6. Besarnya tenaga kerja yang mendapatkan rekomendasi pemagangan	25 orang
		7. Prosentase peningkatan Perusahaan yang sudah memenuhi persyaratan dan membentuk sarana hubungan industrial	39%
		8. Prosentase Perusahaan yang memfasilitasi tenaga kerja	36%

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		mengikuti jamsostek	
		9. Prosentase Pekarja / Buruh yang menjadi peserta jamsostek	70.60%
		10. Rasio rata-rata upah minimum kabupaten dibanding angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak)	100%
	2. Meningkatnya kesempatan kerjan Kesempatan kerja	1. Pencari kerja yang ditempatkan	2000 orang
		2. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan perluasan kerja	370 orang
<b>15.</b>	<b>BIDANG KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</b>		
	1. Meningkatnya pengelolaan, pengembangan perpustakaan	1. Jumlah pengunjung perpustakaan	191.421
		2. Jumlah koleksi bahan pustaka	39.920
	2. Meningkatnya pengelolaan, penyelamatan arsip daerah	Prosentase arsip yg dikelola	7%
<b>16.</b>	<b>BIDANG KOPERASI DAN UKM</b>		
	1. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Prosentase jmlh koperasi aktif	86%
	2. Meningkatnya pemberdayaan UMK	Prosentase peningkatan usaha mikro kecil yg dibina	7%
	3. Meningkatnya pengelolaan industri kecil dan menengah	Prosentase industri kecil dan menengah yg dibina sistem pengelolaannya	73%
	4. Meningkatnya	Cakupan perlindungan konsumen dan	100%

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan daerah	pengamanan perdagangan daerah	
	5. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan	Prosentase jumlah pasar daerah dalam kondisi baik	54%
	6. Peningkatan promosi perdagangan	Cakupan jenis komoditas yg dipromosikan	100%
<b>17.</b>	<b>BIDANG PENANAMAN MODAL</b>		
	Peningkatan promosi investasi	Prosentase peningkatan nilai infestasi	2%, 223 M
<b>18.</b>	<b>BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH DAN KEPEGAWAIAN</b>		
	1. Optimalnya perencanaan pembangunan daerah	Cakupan optimalisasi sistem perencanaan pembangunan daerah	100%
	2. Meningkatnya fasilitasi penyusunan statistik dasar	Prosentase ketersediaan statistik sektoral dan daerah	100%
	3. Optimalnya penyelenggaraan persandian	Prosentase layanan persandian	100%
	4. Optimalnya pengelolaan keuangan daerah	1. Prosentase ketetapan waktu penyusunan APBD dan APBD perubahan	100%
		2. Prosentase pemantauan penyusunan APBDes tepat waktu	100%
		3. Tertib pengelolaan keuangan daerah	100%

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		4. Ketepatan waktu dan keakuratan laporan keuangan daerah	100%
		5. Prosentase peningkatan PAD terhadap pendapatan daerah	14,50%
		6. Tingkat capaian PAD terhadap target	100%
		7. Prosentase pengelolaan aset yg dikelola dg baik	100%
	5. Meningkatnya manajemen kepegawaian daerah	1. Prosentase ketersediaan jumlah pegawai sesuai formasi	88%
		2. Prosentase pegawai yg telah lulus diklat prajabatan	100%
		3. Prosentase jabatan pimpinan tinggi, adm dan fungsional yg telah memenuhi kualifikasi yg disyaratkan	91%
		4. Tingkat disiplin pegawai	98,50%
		5. Prosentase penyelesaian adm kepegawaian	100%
	6. Meningkatnya penelitian dan pengembangan	1. Tingkat ketersediaan kajian kelitbang sesuai kebutuhan	100%
		2. Prosentase tingkat penguatan sistem inovasi daerah	100%
	7. Terselenggaranya dukungan penyelenggaraan fungsi DPRD	Terwujudnya dukungan penyelenggaraan fungsi DPRD	100%
	8. Optimalnya perumusan kebijakan	Tingkat ketersediaan kebijakan daerah untuk penyelenggaraan pemerintah daerah	100%

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	pemerintah daerah		
	9. Meningkatnya koordinasi perangkat daerah	1. Prosentase jumlah urusan daeah yg dikoordinasikan	100%
		2. Tingkat pelayanan pembentukan kerja sama daerah	100%
	10. Meningkatnya pelayanan adm pemerintahan	1. Prosentase penyelesaian layanan adm pemerintah daerah	100%
		2. Tingkat at pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%
		3. Tingkat kemudahan akses masyarakat terhadap informasi publik	100%
		4. Prosentase ketertiban adm pemerintahan desa	100%
	11. Terselenggara nya fasilitasi koordinasi kehidupan beragama	Jumlah layanan koordinasi dan fasilitasi kehidupan beragama	100%
	12. Meningkatnya pelayanan komunikasi publik	Wahana komunikasi publik	100%
	13. Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1. Prosentase cakupan desa yg diperiksa/dievaluasi	13%

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		2. Prosentase cakupan satuan kerja yg diperiksa per tahun	20%
		3. Prosentase cakupan maturitas SPIP bernilai 2	20%
		4. Prosentase cakupan pemeriksaan kasus yg tertangani	100%
		5. Prosentase pengembalian kerugian negara/daerah ke kas negara/daerah	100%
		6. Tingkat ketersediaan laporan pajak-pajak pribadi dan LHKSN	100%
		7. Tingkat ketersediaan sistem dan prosedur pengawasan	100%
		8. Prosentae SDM pemeriksa yg mengikti bimbingan teknis	100%
		9. Tingkat SDM fungsional pemeriksa sesuai penjenjangan	100%
	20. Optimalisasi fungsi kecamatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Prosentase tertib adm kecamatan dan desa (terkoordinasinya kecamatan dan desa; terlayannya masyarakat untuk adm pemerintahan kecamatan); (ketersediaan prioritas pembangunan wilayah; terfasilitasinya penyusunan APBDesa; terkendalikannya pelaksanaan APBDesa; terfasilitasinya pemenuhan/penanganan target pembayaran PBB, terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan wilayah); dan (terjaganya kondusifitas ketertiban dan keamanan wilayah; terfasilitasinya dan terbinanya kegiatan pemberdayaan masyarakat)	100%
	21. Optimalisasi fungsi kelurahan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Prosentase tertib administrasi kelurahan (terlayannya masyarakat untuk adm pemerintahan kelurahan); (ketersediaan prioritas pembangunan kelurahan); terfasilitasi dan terkoordinasinya pelaksanaan	100%

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		pembangunan);kelurahan dan (terjaganya kondusifitas ketertiban dan keamanan kelurahan; terfasilitasinya dan terbinanya kegiatan pemberdayaan masyarakat)	

Purworejo, 1 Januari 2017

BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

**AGUS BASTIAN, SE, MM**